

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi RENSTRA bagi Dinas Ketahanan Pangan adalah memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang, untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain serta mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu walikota dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategik (Renstra).

Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Potensi tersebut menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dengan menyelaraskannya pada pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima setiap tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya Peningkatan Ketersediaan Pangan (Food Availability), Akses Pangan/Distribusi (Food Acces), Penyerapan Pangan/Konsumsi (Food Utilization) dengan demikian program-program ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan masyarakat.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor );
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor );
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinegritas pembangunan ketahanan pangan dengan arah kebijakan dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;

- c. Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kota Bima pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan

#### 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Rencana Strategis Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

##### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW/KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

##### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

##### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

##### PENUTUP

## **BAB. II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor) dan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mempunyai Tugas Pokok membantu kepala daerah (Walikota Bima) dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang ketahanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh satu orang Sekertaris, empat Kepala Bidang, dua Kasubag dan sembilan Kepala Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dapat digambarkan melalui struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

#### I. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## II. Sekertaris

Tugas :

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas

Fungsi :

- a. Pengordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi
- b. Pengelolaan urusan keuangan

- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas
- d. Pengelolaan urusan ASN; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

### III. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan
- 2. Seksi Sumberdaya Pangan
- 3. Seksi Kerawanan Pangan

#### IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi :

- 1. Seksi Distribusi pangan
- 2. Seksi Harga Pangan
- 3. Seksi Cadangan Pangan

V. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan

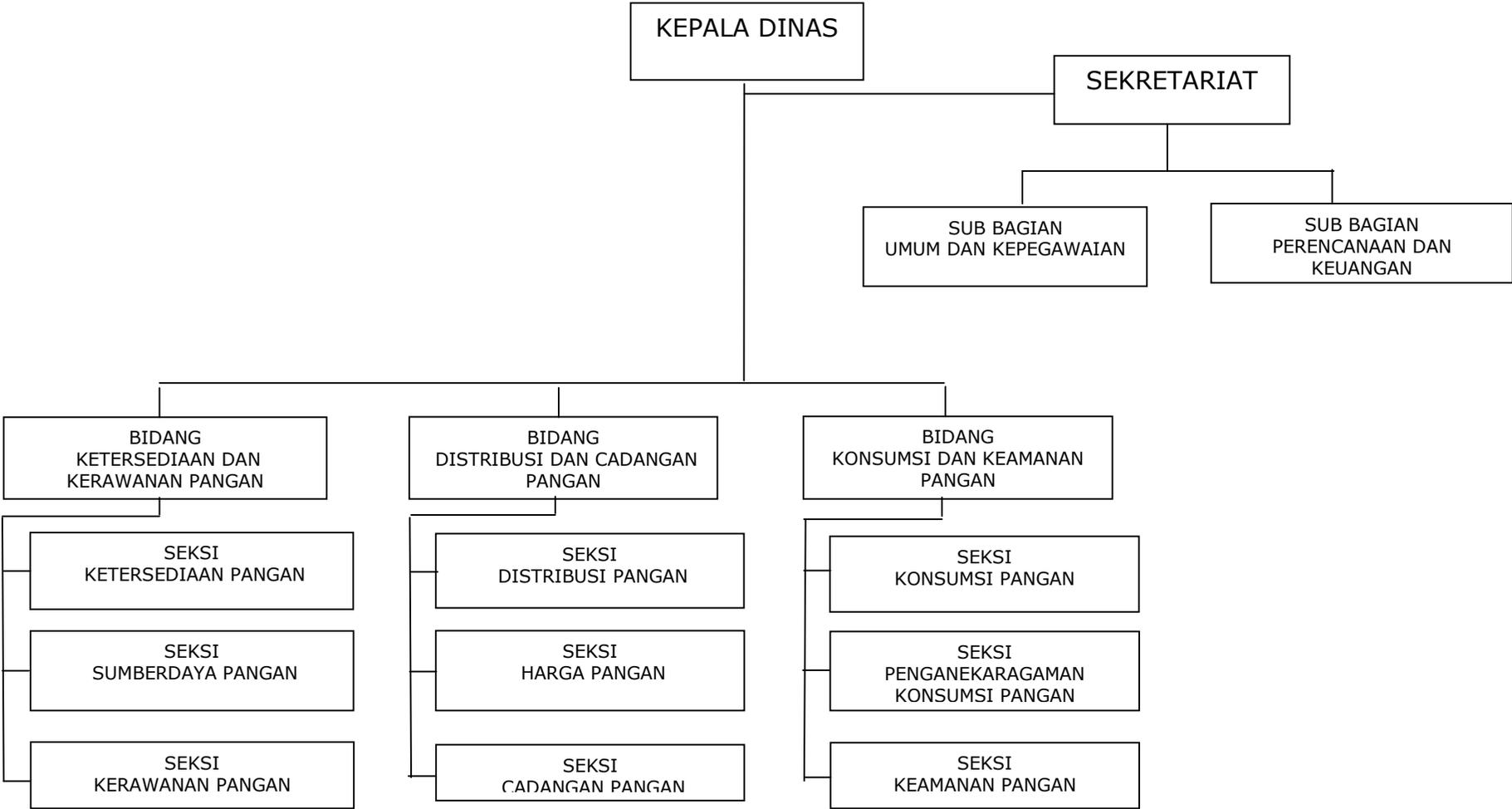
Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang, konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

1. Seksi Konsumsi Pangan
2. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
3. Seksi Keamanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima



## 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima hanya memiliki pegawai struktural tidak memiliki pegawai Fungsional.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memiliki pegawai sebanyak 39 orang terdiri dari 23 orang PNS dan 16 orang Pegawai Non PNS.

Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terdiri dari :

- Pegawai golongan IV sebanyak 5 orang atau 21,74 %
- Pegawai golongan III sebanyak 15 orang atau 65,22 %
- Pegawai golongan II sebanyak 3 orang atau 13,04 %
- Pegawai golongan I tidak ada 0 %

Selengkapnya mengenai pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan golongan/pangkat tahun 2018

golongan/pangkat	A	b	c	d	Jumlah
IV	1	3	1	0	5
III	1	3	2	9	15
II	0	0	3	0	3
I	0	0	0	0	0
JUMLAH	2	5	5	10	23

Dari tabel pegawai berdasarkan golongan dan pangkat terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima didominasi oleh pegawai bergolongan III sebanyak 65,22 %.

Sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
S-2	3	0	3
S-1	5	11	16
D-4	0	0	0
D-3	0	1	1
D-1/D-2	0	0	0
SLTA	1	2	3
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
Jumlah	9	14	23

Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai pria di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebanyak 9 orang atau 39,13 %, dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 14 orang atau 60,86% dengan demikian jumlah pegawai wanita di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melebihi standar/komposisi anjuran pemerintah yaitu sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan pegawai.

b. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima didukung dengan aset/modal seperti pada tabel berikut :

Tabel.3. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima per 31 Desember 2018.

No	Sarana Prasarana	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1		1
2	Aula	1		1
3	Gudang Pangan	1		1
4	Mobil	1		1
5	Sepeda Motor	8		8

6	Laptop	8		8
7	Vidiotron	1		1
8	LCD Proyektor	3		3
9	Wifi	1		1
10	AC/pendingin Udara	3		3
11	Camera Digital	4		4
12	Printer	5		5
13	Sond System	1		1
14	Kipas Angin	2		2
15	Handy Cam	1		1
16	Kursi Kerja Pegawai	26		26
17	Meja Kerja	26		26
18	Televisi	1		1
19	Kursi Tunggu	1		1
20	Kursi Kerja Eselon II	1		1
21	Kursi Kerja Eselon III	4		4
22	Kursi Kerja Eselon IV	0		0
23	Lemari Kaca	5		5
24	Filing Kabinet	3		3

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memiliki peranan penting dalam kaitanya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Bima serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan kinerja masing-masing program seperti pada tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 berikut :

**Tabel T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>																		
	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun				-	-	-	1200 lbr	1200 lbr	-	-	-	1200 lbr	1200 lbr					
	Jumlah jasa yang tersedia				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
	Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan diurus perizinannya				-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit					
	Jumlah jasa administrasi				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
	Jumlah ATK				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
2.	<b>Persentase peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana</b>																		
	Jumlah gedung kantor				-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit					
	Jumlah peralatan gedung kantor baru				-	-	-	4 paket	4 paket	-	-	-	4 paket	4 paket					
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit					
	Jumlah Perlengkapan kantor baik				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					

	Jumlah peralatan terawat				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln					
<b>3.</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin pegawai</b>																		
	Jumlah pegawai berpakaian seragam				-	-	-	40 org	40 org	-	-	-	40 org	40 org					
<b>4.</b>	<b>persentase peningkatan sumberdaya pegawai</b>																		
	Jumlah pegawai yang ikut sosialisasi				-	-	-	40 org	40 org	-	-	-	40 org	40 org					
<b>5.</b>	<b>Persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>																		
	Jumlah Dokumen yang harus disediakan				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja				-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen					
	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan				-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen					
<b>6.</b>	<b>Persentase peningkatan ketahanan pangan</b>																		
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan							80	80				80	80					
	Jumlah Laporan yang disusun				-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen					
	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan				-	-	-	6 Kelurahan	6 Kelurahan	-	-	-	6 Kelurahan	6 Kelurahan					
	Jumlah Komoditi terdata Harganya				-	-	-	17 Komoditi	17 Komoditi	-	-	-	17 Komoditi	17 Komoditi					
	Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				-	-	-	15,6 Ton	15,6 Ton	-	-	-	15,6 Ton	15,6 Ton					
	Jumlah kelurahan Mandiri Pangan				-	-	-	10 Kelurahan	10 Kelurahan	-	-	-	10 Kelurahan	10 Kelurahan					
	Terwujudnya Diversifikasi Tanaman				-	-	-	2 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket					
	Jumlah lumbung pangan desa				-	-	-	4 unit	4 unit	-	-	-	4 unit	4 unit					

	Jumlah kelompok yang dikembangkan				-	-	-	4 LDPM	4 LDPM	-	-	-	4 LDPM	4 LDPM				
	Persentase pangan yang aman dikonsumsi				-	-	-	5%	5%	-	-	-	5%	5%				
	Jumlah kecamatan yang diberikan penyuluhan				-	-	-	5 Kecamatan	5 Kecamatan	-	-	-	5 Kecamatan	5 Kecamatan				
	Jumlah kelurahan peserta lomba				-	-	-	41 Kelurahan	41 Kelurahan	-	-	-	41 Kelurahan	41 Kelurahan				
	Jumlah Laporan SKPG				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				
<b>7.</b>	<b>Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi</b>																	
	Jumlah promosi produksi unggulan daerah				-	-	-	2 Kali	2 Kali	-	-	-	2 Kali	2 Kali				

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA</b>	-	-	-	3.752.516.330,12	4.289.699.403,24	-	-	-	3.538.668.809	4.026.333.961				94,30%	93,86%		
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	-	-	-	1.822.504.330	1.759.699.403,24	-	-	-	1.781.851.776	1.648.536.845				97,77%	93,68%		
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	-	-	-	1.930.012.000,00	2.530.000.000,00	-	-	-	1.756.817.033	2.377.797.116				91,03%	93,98%		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISIRASI PERKANTORAN</b>	-	-	-	<b>697.006.600</b>	<b>661.134.900</b>	-	-	-	<b>600.651.902</b>	<b>598.307.786</b>				86,18%	90,50%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	74.932.200	156.600.000	-	-	-	73.485.000	<b>156.591.000</b>				98,07%	99,99%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	-	-	-	58.400.000	37.200.000	-	-	-	39.071.784	<b>15.470.795</b>				66,90%	41,59%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	-	-	-	13.767.800	13.767.800	-	-	-	2.804.800	<b>6.677.800</b>				20,37%	48,50%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	44.388.000	46.488.000	-	-	-	42.930.000	<b>46.488.000</b>				96,72%	100,00%		
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	39.775.000	<b>39.238.500</b>				99,44%	98,10%		

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	65.000.000	55.000.000	-	-	-	43.927.000	<b>38.840.000</b>				67,58%	70,62%		
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	62.580.000	22.260.000	-	-	-	62.460.000	<b>10.780.000</b>				99,81%	48,43%		
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	34.000.000	25.834.200	-	-	-	23.700.000	<b>25.688.500</b>				69,71%	99,44%		
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	-	-	278.938.600	228.054.900	-	-	-	247.538.318	<b>225.598.191</b>				88,74%	98,92%		
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	-	-	25.000.000	35.930.000	-	-	-	24.960.000	<b>32.935.000</b>				99,84%	91,66%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	-	-	-	<b>136.490.000</b>	<b>141.890.000</b>	-	-	-	82.331.731	<b>88.547.102</b>				60,32%	62,41%		
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	46.490.000	53.890.000	-	-	-	45.331.500	<b>53.800.000</b>				97,51%	99,83%		
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	30.000.000	28.000.000	-	-	-	25.076.231	<b>21.777.602</b>				83,59%	77,78%		
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	30.000.000	40.000.000	-	-	-	5.424.000	<b>8.254.500</b>				18,08%	20,64%		
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	30.000.000	20.000.000	-	-	-	6.500.000	<b>4.715.000</b>				21,67%	23,58%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	-	-	-	<b>25.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	-	-	-	24.786.000	<b>30.580.000</b>				99,14%	98,65%		
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	25.000.000	31.000.000	-	-	-	24.786.000	<b>30.580.000</b>				99,14%	98,65%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	-	-	-	<b>12.950.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	-	12.950.000	<b>9.250.000</b>				100,00%	92,50%		

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	12.950.000	10.000.000	-	-	-	12.950.000	9.250.000				100,00%	92,50%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA&amp;KEUANGAN</b>	-	-	-	<b>133.500.000</b>	<b>151.100.000</b>	-	-	-	133.500.000	151.100.000				100,00%	100,00%		
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	8.000.000	25.600.000	-	-	-	8.000.000	25.600.000				100,00%	100,00%		
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-	15.750.000	15.750.000	-	-	-	15.750.000	15.750.000				100,00%	100,00%		
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	15.750.000	15.750.000	-	-	-	15.750.000	15.750.000				100,00%	100,00%		
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000				100,00%	100,00%		
Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	-	-	-	54.000.000	54.000.000	-	-	-	54.000.000	54.000.000				100,00%	100,00%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	-	-	-	<b>832.415.400</b>	<b>1.474.875.100</b>	-	-	-	811.577.000	1.440.210.628				97,50%	97,65%		
Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	-	-	76.565.000	-	-	-	-	76.350.000	-				99,72%	0,00%		
Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	-	-	-	26.175.000	51.875.000	-	-	-	26.175.000	51.384.000				100,00%	99,05%		
Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	-	-	-	25.410.400	38.400.000	-	-	-	25.410.000	37.461.600				100,00%	97,56%		
Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	-	-	-	26.750.000	101.565.000	-	-	-	26.750.000	100.332.600				100,00%	98,79%		
Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk	-	-	-	77.695.000	141.765.000	-	-	-	77.382.000	136.288.000				99,60%	96,14%		

Pengembangan Pangan																	
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	-	-	-	37.600.000	269.935.000	-	-	-	37.600.000	<b>268.927.218</b>				100,00%	99,63%		
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	-	-	-	55.790.000	422.720.000	-	-	-	53.060.000	<b>416.342.108</b>				95,11%	98,49%		
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	-	-	-	64.540.000	74.250.000	-	-	-	64.435.000	<b>73.788.000</b>				99,84%	99,38%		
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	-	-	-	89.240.000	65.840.000	-	-	-	88.790.000	<b>65.555.000</b>				99,50%	99,57%		
Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa	-	-	-	26.800.000	22.950.000	-	-	-	26.800.000	<b>22.765.263</b>				100,00%	99,20%		
Kegiatan Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	-	-	-	40.950.000	60.367.000	-	-	-	40.850.000	<b>56.600.000</b>				99,76%	93,76%		
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	-	-	-	51.275.000	45.157.100	-	-	-	42.985.000	<b>42.572.100</b>				83,83%	94,28%		
Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	-	-	-	23.675.000	67.250.000	-	-	-	23.665.000	<b>58.829.000</b>				99,96%	87,48%		
Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-	-	-	165.000.000	58.981.000	-	-	-	156.815.000	<b>58.981.000</b>				95,04%	100,00%		
Kegiatan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	-	-	-	44.950.000	53.820.000	-	-	-	44.510.000	<b>50.384.739</b>				99,02%	93,62%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	-	-	-	<b>92.650.000</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	-	91.020.400	<b>59.801.600</b>				98,24%	99,67%		
Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Pertanian Unggulan Daerah	-	-	-	92.650.000	60.000.000	-	-	-	91.020.400	<b>59.801.600</b>				98,24%	99,67%		

Kinerja Pelayanan Dinas ketahanan Pangan Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu kepala daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan. Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daeran Nomor 5 Tahun 2016 dan Peratyran Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016.

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman. Menurut Bappenas (2011), pangan pokok adalah pangan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi atau dikonsumsi secara teratur sebagai makanan utama, selingan, sebagai sarapan atau sebagai makanan pembuka atau penutup. Konsumsi pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu, sehingga wajib bagi setiap individu untuk memenuhinya.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan oleh setiap individu akan mempengaruhi status ketahanan pangan individu tersebut. Ketersediaan pangan dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan dalam rumah tangga itu sendiri. Menurut Sina et all (2009), terwujudnya ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga berarti mampu memperoleh pangan yang cukup jumlah, mutu, dan beranekaragam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Ketahanan pangan menurut Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

merata dan terjangkau. Kecukupan pangan secara nasional tidak dapat menjamin bahwa semua orang (keluarga) memperoleh makanan yang dibutuhkannya.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang memiliki kontribusi terbesar terhadap konsumsi kalori (55%) dan konsumsi protein (44%).

Kota Bima merupakan salah satu kota penghasil padi sawah di Nusa Tenggara Barat. Kota Bima berdasarkan data produksi tahun 2018 mempunyai ketersediaan pangan utama sebesar 32.194.123 kg, sementara kebutuhan masyarakat Kota Bima sebanyak 19.941.395 kg hal ini menggambarkan bahwa Kota Bima mengalami surplus sebesar 12.252.728 kg.

Cara perhitungan sebagai berikut :

Kebutuhan/kap/tahun x jumlah penduduk

$$117,5 \times 169,714 = 19.941.395$$

Jadi ketersediaan – kebutuhan/tahun adalah

$$32.194.123 - 19.941.395 = 12.252.728$$

## 2. Ketersediaan Energi dan Protein

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk disuatu wilayah dapat ditunjukkan oleh dimensi kuantitatif yaitu berdasarkan energi dan zat gizi tiap orang tiap hari. Pangan yang tersedia dikatakan memenuhi kebutuhan penduduk jika energinya mencapai angka 2,200 kkal/kap/hari dan proteinnya 57 gram/kap/hari. Ketersediaan energi dan protein di Kota Bima berdasarkan perhitungan Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan bahwa data ketersediaan energi perkapita pada akhir tahun 2018 mencapai 2,790 kkal/kap/hari sedangkan protein capaiannya sebesar 57,99 gram/kap/hari, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein di Kota Bima mengalami peningkatan dari standar nasional

### 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terdiri dari:

#### 1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk PSAT dan organik, baik di tingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Pengadaan *rapid test kit* untuk deteksi cepat residu pestisida dan atau mikroba;
- (2) Pengujian keamanan pangan segar di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkupnya;
- (3) Melakukan pemantauan, pengawasan keamanan pangan segar.

#### 2. Promosi Keamanan Pangan Segar

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi

keamanan pangan segar. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan dan mendistribusikan leaflet, poster dan bahan promosi lainnya;
- (2) Berperan serta dalam pameran.

Dalam pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima bertugas:

- (1) Menyusun petunjuk teknis;
- (2) Melakukan sertifikasi dan registrasi pangan segar;
- (3) Melakukan pengawasan keamanan pangan segar di Kota Bima;
- (4) Melakukan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar;
- (5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan

#### 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) juga merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan

mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dalam perhitungan PPH menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutrition balance) berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability)

Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 9 kelompok pangan yaitu : Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak, Buah/biji berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur-sayuran dan buah, Lain-lain.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bima Tahun 2018 sebesar 90.

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”.

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara

kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

#### 5. Penguatan Cadangan Pangan

Upaya mencapai ketahanan pangan berkelanjutan selama ini melalui pendekatan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu tergantung aksesibilitasnya terhadap pangan. Kecukupan pangan pada tingkat makro belum menjamin kecukupan pangan setiap individu atau rumah tangga. Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dapat dipenuhi dari produksi dan cadangan pangan sendiri. Penguatan cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antara waktu disetiap tingkatan wilayah, menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis. Cadangan pangan Pemerintah Kota Bima sampai dengan tahun 2018 sebanyak 8 ton lebih. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga. Salah satu bentuk kelembagaan cadangan pangan masyarakat adalah lumbung pangan. Kota Bima sampai dengan tahun 2018 memiliki 4 kelompok lumbung pangan melalui APBN

## 2.4. Tantangan dan Peluang

### a. Tantangan

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yaitu :

- Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan
- Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
- Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras
- Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat
- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian
- Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat

### b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Adanya teknologi yang terus berkembang
- Potensi diversifikasi bahan pangan
- Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
- Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kota Bima

- Terbentuknya kelompok afinitas mandiri pada setiap program dan kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin
- Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara provinsi, kabupaten dan kota
- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Bima dalam upaya pengentasan kemiskinan

### SWOT ANALYSIS

Tujuan: Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat

<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cukupnya ketersediaan pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal</li> <li>-Masyarakat responsive terhadap pembangunan ketahanan pangan</li> </ul>	<p><b>S</b></p>	<p><b>W</b></p>	<p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi seimbang, beragam dan aman dikonsumsi</li> <li>-Masih terdapat masyarakat miskin dikelurahan dan daya beli masyarakat</li> </ul>
<p><b>Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan</li> <li>-Trend perubahan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan</li> </ul>	<p><b>O</b></p>	<p><b>T</b></p>	<p><b>Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Bima</li> </ul>

Tabel. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD

No	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Pangan sehat (Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal)	Mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2	Sumberdaya lokal (Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi)	Mewujudkan kesejahteraan petani	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	Peningkatan diversifikasi pangan		
3.	Kesejahteraan petani (Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya)		Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	Peningkatan pendapatan keluarga petani		

### Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
	<i>A. Perwujudan Pusat Pelayanan</i>				
	Penataan kawasan pantai Amahami – Niu				
	Pembangunan Superblock Bina Baru				
	Pembangunan Universitas Negeri Bima				
	Pembangunan Rumah Sakit				
	<i>B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota</i>				
	Pembangunan jalan lingkar luar selatan dari Oi Ni'u – Nitu – Oi Fo'o – Kumbe Mande – Lewirato.				
	Pembangunan jalan tembus mulai dari Jalan Gatot Subroto - di belakang SMAN 4 Kelurahan Penatoi				
	Mengembangkan terminal bongkar muat barang				
	Normalisasi aliran sungai-sungai utama,				
	yaitu Sungai Lampe, Sungai Padolo, Sungai				
	Melayu, dan Sungai Jatibaru beserta anak- anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase primer				
	Pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan				

	Pengembangan PDAM Kota				
	Pemeliharaan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada				
	Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Oi Fo'o				
	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah melalui konsep 3R ( <i>Reduce, Recycle, Reuse</i> )				
	Mengembangkan jaringan air limbah komunal				
	Menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan				
	Menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai				
	Penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan				
	Pengembangan dan penataan sistem aliran Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai Romo sebagai saluran utama				
	Pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kota-kabupaten dari hulu - hilir				
	B.10. Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana				
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk menjauhi lokasi-lokasi genangan dan bencana banjir				
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai				
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi				
	bencana gempa bumi				

## **BAB. III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Bima. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kota Bima selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.

3. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan banjir masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah bagian barat yang terkena dampak banjir bandang
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
7. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
8. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Visi Pemerintah Kota Bima merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kota Bima yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah : MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI.

Visi Pembangunan Kota Bima ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Bima dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 khususnya bagi masyarakat Kota Bima.

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA***

- a. **BERKUALITAS** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. **SETARA** adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
  - Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
  - **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
  - **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;

- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : ***menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- b. Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu

kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

Penjelasan Misi tersebut dapat dilihat pada tabel Perumusan Penjelasan Misi dibawah ini.

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	<b>Kota Bima yang Berkualitas</b>	<b>Misi Pertama</b> : <i>Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing</i>	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
2	Masyarakat <b>Sejahtera</b>	<p><b>Misi Kedua :</b> Mewujudkan Masyarakat <b>Sejahtera</b> melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan</p>	<p>- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.</p> <p>- Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;</p>
3	<b>Transparan</b>		Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan
4	<b>Akuntabilitas</b>	<p><b>Misi Ketiga :</b> Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</p>	<p>reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan</p>

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			pelaksanaan pembangunan;
5	<b>Lingkungan Perkotaan yang Ramah</b>	<p><b>Misi Keempat:</b> Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan <b>Ramah</b>, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana</p>	<p>Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;</p>
6	<b>Masyarakat Agamais</b>	<p><b>Misi Kelima :</b> Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan <b>Agamais</b></p>	<p>Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.</p>

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan :

- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.
- Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasai untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program walikota dan wakilwalikota terpilih

visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis Pengembangan Produk unggulan			

	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, PPH, Ketersediaan pangan	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi
		Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
		Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius	Ketersediaan Alat Penguji Keamanan masih kurang	Tersedianya Alat penguji keamanan mutu pangan

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Tabel : Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis pangan lokal	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan amana	Frekwensi sosialisasi sedikit	Tersedianya petugas sosialisasi
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Menurunnya ketersediaan pangan masyarakat	Perubahan iklim	Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai sumber pangan alternatif
3	Stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	Berkurangnya pelaksanaan operasi pasar	Stock Bahan pangan kurang	Jalur distribusi pangan lancar
4.	Terpenuhiya Cadangan Pangan Pemerintah dan rumah Tangga	Belum optimalnya pengadaan beras cadangan pemerintah	Volume pengadaan kurang	Gudang penyimpanan tersedia
5	Peningkatan keamanan pangan segar yang aman dan bermutu	Luas dan beragamnya komoditi yang diuji	Tidak tersedianya tenaga terampil serta alat dan bahan penunjang	Anggaran tersedia

### 3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Hal penting dalam rencana tata ruang wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah terjadi alih fungsi lahan pertanian beririgasi secara kurang terkendali sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah potensi irigasi dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bima untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Sedangkan isu yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran sumber daya air dan masih terdapatnya lahan-lahan kritis di Kota Bima, disamping itu tumbuhnya permukiman penduduk dengan semua aktifitasnya pada bantaran sungai/anak sungai, sempadan irigasi dan sekitar saluran drainase berdampak pada terganggunya fungsi sarana-prasarana wilayah.

#### **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima**

<b>No</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Startegi</b>
1	penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya;	mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota; mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan; mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung

2	<p>pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional;</p>	<p>meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkaran Selatan dan lingkaran Utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;</p> <p>mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat</p> <p>meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana dan transportasi massal yang berbasis moda jalan</p> <p>memelihara, merehabilitasi serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota</p>
3	<p>peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan secara optimal;</p>	<p>mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan</p> <p>mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu</p>

		<p>membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan serta antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah</p> <p>meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir serta pembangunan kota tepian air (water front city)</p> <p>merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota</p> <p>mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan</p> <p>meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan; d</p> <p>mengembangkan dan memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran pada Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan rakyat maupun pelabuhan bongkar muat dan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarananya</p>
4	<p>pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana;</p>	<p>Strategi pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana kota</p>
5	<p>pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan</p>	<p>menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota</p>

	mendukung perkembangan wilayah kota	<p>memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota</p> <p>memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH</p> <p>menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh 30 - 100 (tiga puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat</p> <p>memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan sungai;</p> <p>melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung</p>
6	pencegahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang	<p>mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;</p> <p>mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung</p> <p>menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.</p>
7	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota	<p>menerapkan ketentuan luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen)</p> <p>merevitalisasi dan memantapkan kualitas ruang terbuka hijau yang ada;</p> <p>mengembangkan ruang terbuka hijau secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan ruang terbuka hijau</p>

		<p>mengembangkan ruang terbuka hijau berupa lahan konservasi dan resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, serta lapangan olahraga</p> <p>mempertahankan jalur-jalur hijau yang berada di sepanjang jaringan jalan</p>
8	perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki nilai historis dan spiritual;	<p>melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah</p> <p>revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya loka</p> <p>merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;</p> <p>melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya</p>
9	pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;	<p>menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana</p> <p>mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;</p> <p>menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;</p> <p>mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu</p> <p>meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana</p> <p>memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan</p> <p>mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam</p>
10	pengembangan kawasan budidaya	<p>pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan</p>

		ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, 16 kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan.
11	pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan; mengembangkan sarana dan prasarana perumahan; mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai
12	pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah kota	menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa; mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan local memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

#### a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima tahun 2017 sebanyak 166.407 jiwa (BPS : Sensus penduduk tahun 2010 - 2020) meningkat menjadi 169.714 jiwa pada tahun 2018, naik sebesar 1,02% (3.307 jiwa). Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah Kota Bima khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumber daya lahan pertanian sebagai “pabrik” bahan pangan luasnya relatif

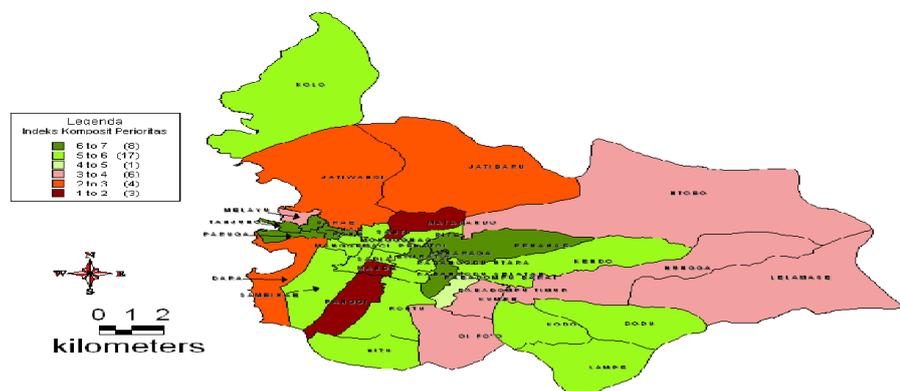
tetap bahkan cenderung terus berkurang akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan disektor lainnya.

### **b. Ketahanan dan Kerentanan Pangan**

Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2013, dari 38 jumlah Kelurahan di Kota Bima terdapat 12 Kelurahan yang tergolong rentan pangan.

*Pada tahun 2019 peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2013 sudah tidak bisa dipakai sebagai standar kerawanan pangan di Kota Bima, hal ini disebabkan karena kategori dalam penyusunan peta sudah tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan, di propinsi NTB Kota Bima dan Kota Mataram untuk peta kerawanan pangan tidak dapat digunakan karena belum ada kategori yang tepat untuk menentukan rawan atau tidaknya suatu wilayah terhadap pangan.*

*Pada Tahun 2013 Kota Bima sesuai peta kerawanan pangan tahun 2013 terdata 12 kelurahan yang mengalami kerawanan pangan yaitu Kelurahan Matakando, Kelurahan Panggi, Kelurahan Mande, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Dara, Kelurahan Oi Fo,o, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nungga, Kelurahan Kumbe, Kelurahan Melayu.*



### **c. Balita dengan Gizi Buruk**

Masalah pangan dan gizi sangat terkait dengan permasalahan ekonomi. Masih rendahnya daya beli masyarakat/rumah tangga dalam mengkonsumsi pangan dan gizi yang sehat dan berimbang, kondisi ini bila disertai dengan pola asuh terhadap bayi dan anak-anak balita pada gilirannya akan berdampak pada terjadinya kasus-kasus balita dengan gizi kurang atau buruk.

**d. Kasus Keracunan Makanan**

Makanan adalah bahan yang paling sering berinteraksi dengan tubuh manusia bagian dalam (dalam saluran), setidaknya 2 atau 3 kali bahan makanan masuk kedalam perut manusia. Kurangnya kesadaran terhadap aspek-aspek kesehatan pangan dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia, seperti menyebabkan sakit ataupun keracunan yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit yang terdapat dalam makanan. Selama tahun 2017, tidak terpantau kejadian kasus keracunan makanan dan jumlah penderita di wilayah-wilayah kelurahan Kota Bima.

## **BAB. IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

##### TUJUAN

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

##### SASARAN

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan dan Tersedianya cadangan pangan masyarakat

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2		4	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan Pangan Utama	32.194.123 kg	Meningkatnya Pangan Utama	Jumlah penyediaan Pangan Utama	32.215.000 kg	32.230.000 kg	32.245.000 kg	32.255.000 kg	32.265.000 kg
		Ketersediaan Energi	2.300 kkal/kap/hari	Jumlah Ketersediaan Energi	Jumlah Ketersediaan Energi	2.400 kkal/kap/hari	2.500 kkal/kap/hari	2.600 kkal/kap/hari	2.700 kkal/kap/hari	2.800 kkal/kap/hari
		Ketersediaan Protein	57 gram/kap/hari	Jumlah ketersediaan protein	Jumlah ketersediaan protein	57 gram/kap/hari	58 gram/kap/hari	59 gram/kap/hari	60 gram/kap/hari	61 gram/kap/hari
2.	Meningkatkan distribusi dan akses pangan	Penguatan Cadangan Pangan	4,45 ton	Meningkatnya distribusi Pangan	Jumlah Cadangan Pangan	10 ton	12 ton	14 ton	16 ton	18 ton

3.	Meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	6,26%	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pangan	Persentase Pengawasan Pangan	5%	4,16 %	3,57 %	3,12 %	2,77 %
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,9	Meningkatnya nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	83,3	85,7	88,1	90,5	92,8

## BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun gudang pangan.</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan serta mendorong polas keragaman konsumsi.</li> </ol>

## BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel T-C. 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah	lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja pegawai	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 0 3 2 0 3 1 0 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>		100%	571.966.500	100%		100%		100%		100%		100%			
	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	2 0 3 2 0 3 1 0 0 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun		1200 lbr	150.900.000	1230 lbr	165.990.000	1260 lbr	182.589.000	1290 lbr	200.847.900	1320 lbr	220.932.690	1350 lbr	220.932.690	Dishanpan	Kota Bima
	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	2 0 3 2 0 3 1 0 0 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 bln	30.600.000	12 bln	30.600.000	12 bln	30.600.000	12 bln	30.600.000	12 bln	30.600.000	12 bln	30.600.000	Dishanpan	Kota Bima

	Tersedianya STNK kendaraan dinas	2 0 2 0 1 0 0 3 3 3 1 1 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas yang layak		1 unit	13.767.800	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya administrasi keuangan	2 0 2 0 1 0 0 3 3 3 1 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan jasa keuangan		12 bln	46.488.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya ATK	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 1 1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang tersedia		12 bln	26.554.000	12 bln	29.554.000	12 bln	32.554.000	12 bln	35.554.000	12 bln	38.554.000	12 bln	41.554.000	Dishanpan	Kota Bima
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 1 1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan bahan dan dokumen yang release		12 bln	41.000.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya mesin absensi online	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 1 1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor		1 unit	8.500.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 1 1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		12 bln	108.460.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya makanan dan minuman rapat	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 1 1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat		12 bln	25.834.200	12 bln		Dishanpan	Kota Bima								

	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	2 0 2 0 1 0 1 3 3 1 1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 bln	128.362.500	12 bln		Dishanpan	Kota Bima								
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam mencapai kinerja	terselenggaranya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	2 0 2 0 1 0 3 3 1 0 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Tersedianya gedung kantor	2 0 2 0 1 0 0 3 3 2 0 3	Pembangunan Gedung Kantor	Cakupan gedung kantor yang tersedia		1 unit	54.930.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 0 2 0 1 0 0 3 3 1 0 0 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan pengadaan peralatan kantor		4 paket	118.556.500	Dishanpan	Kota Bima										
	Terpeliharanya Kendaraan operasional	2 0 2 0 1 0 2 3 3 1 0 2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan kendaraan dinas yang layak pakai		1 unit	17.000.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor	2 0 2 0 1 0 2 3 3 1 0 2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan perlengkapan gedung kantor		12 bln	21.000.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 0 2 0 1 0 2 3 3 1 0 2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan peralatan gedung kantor		12 bln	12.650.000	Dishanpan	Kota Bima										

Meningkatkan disiplin pegawai	Terselenggaranya peningkatan disiplin pegawai	2 0 2 0 1 0 3 3 3 3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>		100%		100%		100%		100%		100%					
	Tersedianya seragam pakaian dinas kantor	2 0 2 0 1 0 0 3 3 3 3 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah berpakaian seragam yang dibagikan		40 org	24.000.000	55 org	33.000.000	Dishanpan	Kota Bima								
Meningkatnya kapasitas sumber daya pegawai	Terselenggaranya peningkatan sumber daya pegawai	2 0 2 0 1 0 3 3 3 3 5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase peningkatan sumberdaya pegawai</b>		100%		100%		100%		100%		100%					
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	2 0 2 0 1 0 0 3 3 3 3 5 2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi		40 org	26.650.000	55 org	36.643.750	Dishanpan	Kota Bima								
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Terselenggaranya peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	2 0 2 0 1 0 3 3 3 3 6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan</b>		100%		100%		100%		100%		100%					
	Tersedianya laporan SIPD	2 0 2 0 1 0 0 3 3 3 3 6 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan SIPD		1 Dokumen	105.500.000	Dishanpan	Kota Bima										

	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 0 2 0 0 0 3 3 3 1 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Dokumen pelaporan keuangan Semester		1 Dokumen	3.750.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 0 2 0 0 0 3 3 3 1 6 4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	6.250.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersusunnya RKA/DPA/DPPA sesuai ketentuan	2 0 2 0 0 0 3 3 3 1 6 5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja		4 Dokumen	23.000.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Tersusunnya dokumen LKIP, LPJ dan LPPD	2 0 2 0 0 0 3 3 3 1 6 6	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Dokumen LAKIP dan LPPD		2 Dokumen	12.500.000	Dishanpan	Kota Bima										
Meningkatnya ketahanan pangan	Terselenggaranya peningkatan ketahanan pangan	2 0 2 0 0 3 3 3 1 7	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase peningkatan ketahanan pangan</b>		100%		100%		100%		100%		100%					

	Terlaksananya penyusunan menumakanan yang layak bagi masyarakat	2 0 2 0 1 0 0 3 3 7 3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Nilai Skor Pola Pangan Harapan		83,3	19.325.000	85,7	23.325.000	88,1	27.325.000	90,5	31.325.000	92,8	35.325.000	92,8	35.325.000	Dishanpan	Kota Bima
	Terlaksananya penyusunan laporan kondisi ketahanan pangan daerah	2 0 2 0 1 0 0 3 3 7 5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun		2 Dokumen	85.400.000	2 Dokumen	87.400.000	2 Dokumen	89.400.000	2 Dokumen	91.400.000	2 Dokumen	93.400.000	2 Dokumen	93.400.000	Dishanpan	Kota Bima
	Terlaksananya penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan	2 0 2 0 1 0 0 3 3 7 9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan		6 Kelurahan	109.975.000	8 Kelurahan	124.975.000	9 Kelurahan	144.975.000	9 Kelurahan	144.975.000	9 Kelurahan	144.975.000	41 Kelurahan	144.975.000	Dishanpan	Kota Bima
	Terlaksananya pendataan harga pangan utama	2 0 2 0 1 0 1 3 3 7 1	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Komoditi terdata Harganya		17 Komoditi	25.600.000	17 Komoditi	25.600.000	Dishanpan	Kota Bima								

	Terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 7 3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		10 Ton	221.500.000	12 Ton		14 Ton		16 Ton		18 Ton		18 Ton		Dishanpan	Kota Bima
	Terlaksananya pengembangan kelurahan yang mandiri	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 7 4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kelurahan Mandiri Pangan		10 Kelurahan	73.875.000	10 Kelurahan		Dishanpan	Kota Bima								
	Terlaksananya penganekaragaman tanaman	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 7 6	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Terwujudnya Diversifikasi Tanaman		2 Paket	123.600.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Terlaksananya Pengembangan lumbung pangan desa	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 7 8	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan desa		4 unit	12.350.000	4 unit	14.350.000	4 unit	16.350.000	4 unit	18.350.000	4 unit	20.350.000	4 unit	20.350.000	Dishanpan	Kota Bima
	Terlaksananya Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	2 0 2 0 1 0 1 3 3 3 7 9	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah kelompok yang dikembangkan		4 LDPM	28.750.000	4 LDPM	30.750.000	4 LDPM	32.750.000	4 LDPM	34.750.000	4 LDPM	36.750.000	4 LDPM	36.750.000	Dishanpan	Kota Bima

	Terlaksananya pengawasan mutu keamanan pangan	2 0 2 0 1 0 2 3 3 3 7 2	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pesentase pangan yang aman dikonsumsi	6,25 %	5%	76.900.000	4,16 %	76.900.000	3,57%	76.900.000	3,12 %	76.900.000	2,77 %	76.900.000	2,77 %	76.900.000	Dishanpan	Kota Bima
	Terlaksananya sosialisasi sumber pangan alternatif	2 0 2 0 1 0 3 3 3 3 7 0	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah kecamatan yang diberikan penyuluhan		5 Kecamatan	21.000.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Terlaksananya pelaksanaan lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)	2 0 2 0 1 0 3 3 3 3 7 2	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah kelurahan peserta lomba	38 Kelurahan	41 Kelurahan	141.907.000	Dishanpan	Kota Bima										
	Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	2 0 2 0 1 0 3 3 3 3 7 3	Pelaksanaan Sitem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Laporan SKPG		1 Dokumen	63.375.000	Dishanpan	Kota Bima										
Meningkatnya pemasaran hasil produksi	Terselenggaranya promosi hasil produksi	2 0 2 0 1 0 8 3 3 3 8	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi</b>		100%		100%		100%		100%		100%		100%			



**BAB. VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ketersediaan Pangan Utama	32.194.123 kg	32.215.000 kg	32.230.000 kg	32.245.000 kg	32.255.000 kg	32.265.000 kg	32.265.000 kg
2.	Ketersediaan Energi	2.300 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.500 kkal/kap/hari	2.600 kkal/kap/hari	2.700 kkal/kap/hari	2.800 kkal/kap/hari	2.800 kkal/kap/hari
	Ketersediaan Protein	57 gram/kap/hari	58 gram/kap/hari	59 gram/kap/hari	60 gram/kap/hari	61 gram/kap/hari	62 gram/kap/hari	62 gram/kap/hari

3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	6,5%	5%	4,16%	3,57%	3,12%	2,77%	2,77%
4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,9	83,3	85,7	88,1	90,5	92,8	92,8
5.	Penguatan cadangan pangan	5,45 ton	10 ton	12 ton	14 ton	16 ton	18 ton	18 ton

## **BAB VIII. PENUTUP**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri” .

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dapat direview, jika ada perubahan yang signifikan.

Kota Bima, Januari 2019

Kepala Dinas Ketahanan  
Pangan  
Kota Bima

**Ir. Syamsudin**

Pembina Utama TK. I. VI/C  
NIP. 19620103 199203 1 006

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota Bima terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Akhirnya smoga Alloh SWT selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Kota Bima, Januari 2019

Kepala Dinas Ketahanan  
Pangan  
Kota Bima

**Ir. Syamsudin**

Pembina Utama TK. I. VI/C  
NIP. 19620103 199203 1 006

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA  
TAHUN 2018 – 2023**



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	9
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan .	9
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan .....	17
2.4. Tantaangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	30
<b>BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Bersarkan Tugas dan Fungsi .....	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah .....	36
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	44
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS .....	45
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	50
<b>BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	53
<b>BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	56
<b>BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	58
<b>BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	67
<b>BAB 8. PENUTUP</b> .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan golongan
Tabel	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel	Sarana dan prasarana
Tabel	T-C. 23
Tabel	T-C. 24
Tabel	Analisis Renstra K/L dan Renstra OPD
Tabel	Telaahan RTRW
Tabel	Perumusan penjelasan misi
Tabel	Faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi misi
Tabel	Permasalahan pelayanan SKPD
Tabel	Kebijakan dan strategi penataan RTRW
Tabel	T-C. 25
Tabel	T-C. 26
Tabel	T-C. 27
Tabel	T-C. 28